



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR ... TAHUN 2015  
TENTANG  
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS*  
DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang:
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, sehingga dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan mengancam kelangsungan peradaban manusia;
  - b. bahwa penularan *Human Immunodeficiency Virus* semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
  - c. bahwa Kota Ambon merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan;
  - d. bahwa pengaturan mengenai penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, koordinatif, dan berkesinambungan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human*

*Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;*

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang dibentuk oleh WALIKOTA yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Daerah.

6. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, pencegahan, penanganan dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian membatasi penularan serta penyebaran penyakit dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immune Deficiency* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan *Acquired Immune Deficiency* yang berpotensi DITULARKAN melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
8. *Acquired Immune Deficiency* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala DAN TANDA penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
12. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
15. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
16. Konseling Dan Tes HIV Sukarela atau yang selanjutnya disingkat KTS adalah kegiatan konseling dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
17. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
18. Tes HIV Atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi kesehatan.

19. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Konselor.
20. Konselor adalah tenaga medis atau tenaga paramedis dan non medis yang terlatih untuk memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
21. Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela atau kepercayaan.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
24. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
25. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif atau buruk yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan Diskriminasi.
26. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
27. Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki Perilaku Beresiko.
28. Perilaku Beresiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut persiapan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
30. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
31. Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berazaskan:

- a. kemanusiaan;
  - b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - c. keadilan;
  - d. kesetaraan gender;
  - e. kebersamaan;
  - f. terpadu;
  - g. berkesinambungan;
  - h. rahasia; dan
  - i. sukarela.
32. Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS;
  - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan Pelayanan Kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat;
- c. menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi pencegahan, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan dukungan lain yang memadai bagi ODHA;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, Konselor, dan komponen masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
- e. memfasilitasi pemeliharaan kesehatan ODHA dan/atau OHIDHA melalui sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memfasilitasi terbentuknya sarana pelayanan Konseling dan testing, perawatan, pengobatan, dan dukungan.

### Pasal 3

- (1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang :

- a. pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. sistem rujukan;
  - c. pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;
  - d. tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk; dan
  - e. perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap resiko HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III PENULARAN HIV DAN AIDS

#### Pasal 4

HIV dan AIDS dapat menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui:

- a. hubungan seksual beresiko yang tidak terlindungi;
- b. jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. ibu ODHA kepada bayinya.

### BAB IV PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 5

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promosi;
  - b. pencegahan;
  - c. penanganan; dan
  - d. rehabilitasi.

#### Bagian Kedua Promosi HIV dan AIDS

#### Pasal 6

- (1) Promosi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Promosi HIV dan AIDS ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi

- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, KPA dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pencegahan HIV dan AIDS  
Paragraf 1  
Pencegahan  
Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual;
- b. pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui:

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks beresiko;
- b. peningkatan penggunaan kondom 100%(seratus persen) pada setiap hubungan seks beresiko; dan
- c. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan cara penggunaan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain yang steril dan sekali pakai.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melalui:

- a. pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh Palang Merah Indonesia; dan
- b. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

Pasal 11

Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.

#### Pasal 12

Selain pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga dilaksanakan dalam bentuk anjuran kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti konseling HIV di Pusat Kesehatan Masyarakat.

#### Paragraf 2 Tes HIV dan Konseling

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Pelayanan Kesehatan Tes HIV tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat meminta Tes HIV di Sarana Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan Tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dan diakhiri dengan Konseling.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberikan oleh Konselor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengangkatan Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan dapat menganjurkan Tes HIV kepada pasien yang dirawat.
- (2) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan tentang HIV dan AIDS.
- (3) Pasien berhak menolak melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pihak Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan memberikan rujukan dalam hal Tes HIV menunjukkan hasil reaktif.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan milik swasta yang memiliki fasilitas pemeriksaan HIV wajib memiliki Konselor.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan yang melakukan Tes HIV tanpa dilengkapi oleh layanan Konselor dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;



- b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin usaha; dan/ atau
  - d. penghentian atau penutupan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melakukan penapisan HIV dan penyakit lain yang dapat menular Produk Donor seperti hepatitis B, hepatitis C dan sifilis terhadap Produk Donor.
- (2) Dalam hal Tes HIV terhadap Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil reaktif, Sarana Pelayanan Kesehatan tersebut harus menganjurkan kepada pendonor mengikuti Konseling dan Tes HIV.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakan Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

Tes HIV dilarang digunakan sebagai:

- a. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen;
- b. kelanjutan status pekerja/buruh;
- c. kewajiban tes kesehatan rutin; atau
- d. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan.

### Bagian Keempat Penanganan HIV dan AIDS

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya:
  - a. pengobatan, perawatan, dukungan, pendampingan; dan
  - b. pengamatan penyakit.
- (2) Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODHA berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Pengobatan, Perawatan, Dukungan dan Pendampingan

#### Pasal 19

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pengobatan, perawatan, dukungan dan pendampingan;
- b. mendukung kelompok dukungan sebaya;
- c. menyediakan obat ARV, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan pengobatan, perawatan, dukungan dan pendampingan terhadap ODHA; dan
- f. melakukan surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

Pargaraf 3  
Pengamatan Penyakit  
Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pengamatan HIV dengan instansi terkait.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Sero Survei dan/ atau survei lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Sero Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode *unlink anonymous* atau *link confidential*.
- (4) Penggunaan Metode link Confidential sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna
  - b. tersedianya fasilitas Konseling pra testing dan post testing dalam setting klinik; dan
  - c. tersedianya Konselor yang dapat diakses populasi berisiko peserta Sero Survei
- (5) Dinas wajib melaporkan hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Bagian Kelima  
Rehabilitasi Sosial HIV dan AIDS  
Pasal 21

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan bekas pecandu Narkotika, ODHA, OHIDHA dan populasi kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
PERLINDUNGAN SOSIAL  
Pasal 22

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan jiwa, kerentanan sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar:
  - a. kelangsungan hidup dari seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; dan
  - b. melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

#### Pasal 23

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

#### Pasal 24

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya akibat status HIV dan AIDS.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak, kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

#### Pasal 25

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum akibat status HIV dan AIDS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

### BAB VI

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Paragraf 1

##### Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pekerja Sosial, LSM dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
ODHA  
Pasal 27

ODHA berhak:

- a. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang komprehensif sesuai standar yang ditetapkan; dan
- b. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi atau Stigmatisasi; dan
- c. dilindungi hak sipilnya serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi

Paragraf 3  
Tenaga Kesehatan  
Pasal 28

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Paragraph 4  
Pekerja Sosial  
Pasal 29

Pekerja Sosial berhak:

- a. mendapatkan informasi Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Paragraf 5  
LSM  
Pasal 30

LSM berhak mendapatkan informasi Penanggulangan HIV dan AIDS.

Paragraf 6  
Masyarakat  
Pasal 31

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Paragraf 1  
Pemerintah Daerah  
Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan layanan kesehatan lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
  1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
  2. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
  3. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
  4. layanan KTS dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
  5. layanan rehabilitasi medic bagi ODHA dengan biaya terjangkau; dan
  6. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS;
- c. mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatan ke klinik KTS; dan
- d. memberikan hak layanan kesehatan dan hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di Daerah.

#### Paragraf 2

#### ODHA

#### Pasal 33

##### ODHA wajib:

- a. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
- b. melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS; dan
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan tindakan medis.

#### Paragraf 3

#### Tenaga Kesehatan

#### Pasal 34

##### Tenaga kesehatan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dengan cara *unlinked anonymous*;
- b. melakukan konseling sebelum dan sesudah test HIV dan AIDS;
- c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
- d. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa Diskriminasi; dan
- e. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

#### Paragraf 4

#### Pekerja Sosial

#### Pasal 35

##### Pekerja sosial wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab;
- b. mencegah praktek yang tidak manusiawi dan Diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;

- c. memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada klien;
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak klien; dan
- f. memberikan informasi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA.

Paragraf 5

LSM

Pasal 36

(1) LSM wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. melaporkan hasil kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.

(2) LSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pencabutan izin; dan
- d. denda.

Paragraf 6

Masyarakat

Pasal 37

Masyarakat wajib:

- a. menghindari Perilaku Beresiko tertular dan menularkan HIV;
- b. menghargai hak asasi manusia ODHA dan OHIDHA; dan
- c. menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untuk menindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi, atau Stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membuka status HIV.

Pasal 38

(1) Masyarakat yang memiliki atau mengelola perusahaan dan tempat berisiko mempunyai kewajiban:

- a. bekerjasama dengan KPA dan/atau instansi terkait memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
- b. bekerjasama dengan Dinas melaksanakan skrining IMS dan HIV kepada pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan;
- c. memasang tanda peringatan di dalam kamar, wisma atau ruangan yang dikunjungi pelanggan untuk selalu menggunakan kondom; dan
- d. memasang reklame Penanggulangan HIV dan AIDS di Perusahaan atau tempat usaha yang berisiko.

- (2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola perusahaan dan tempat berisiko yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin; dan
  - d. denda.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Paragraf 1  
Pemerintahan Daerah  
Pasal 39

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- c. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.

Paragraf 2  
ODHA  
Pasal 40

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- b. menularkan infeksiya kepada orang lain.

Paragraf 3  
Pekerja Sosial  
Pasal 41

Pekerja Sosial dilarang:

- a. memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi; dan
- b. melakukan, menyetujui, membantu, bekerjasama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik dan perbedaan kapasitas mental dan fisik, serta terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 4  
LSM

## Pasal 42

LSM dilarang:

- a. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- b. menginformasikan data kasus HIV dan AIDS tanpa seizin Dinas.

## Paragraf 5 Masyarakat Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap Perusahaan dilarang mensyaratkan tes HIV sebagai persyaratan penerimaan pekerja baru.

## BAB VII KOMISI PENANGGULANGAN AIDS Pasal 44

- (1) Walikota membentuk KPA Kota dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pekerja Sosial;
  - c. akademisi;
  - d. LSM; dan
  - e. Dunia Usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, struktur organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - c. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
  - d. mencegah terjadinya Stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
  - e. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan serta dalam kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dari Stigma dan Diskriminasi.



- (3) Masyarakat mendorong setiap orang untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik KTS.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi kepada individu, kelompok dan warga masyarakat;
  - b. memberikan materi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada pendidikan formal, non formal dan informal; dan/atau
  - c. Pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok dan masyarakat.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 47

Pengawasan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh KPA dan instansi terkait.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 48

Pembiayaan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, Pasal 38 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 1226 Tahun 2011 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Keputusan Walikota yang mengatur tentang Pembentukan KPA Kota Ambon, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal ...  
WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR ... TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGKULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

HIV (*human immunodeficiency virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Sydnrome* (AIDS). HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok berisiko tertular dan kelompok tertular. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV.

Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfuse darah. Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjajah seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau, dikendalikan dan/atau diawasi karena HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan hidup satu generasi suatu keluarga.

Karena itu, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan.

Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kamauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Ambon, Pemerintahan Kota Ambon mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
3. Penularan HIV dan AIDS;
4. Penanggulangan HIV dan AIDS
5. Perlindungan Sosial;
6. Hak, Kewajiban dan Larangan;
7. Komisi Penanggulangan AIDS;
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Peran Serta Masyarakat
10. Pembiayaan
11. Ketentuan Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Penutup

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi. Peraturan Daerah ini, menugaskan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Kecamatan/Kelurahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek peraturan pengaturan maupun pelaksanaannya.

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar Kecamatan/Kelurahan membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas  
Angka 6  
Cukup jelas  
Angka 7  
Cukup jelas  
Angka 8  
Cukup jelas  
Angka 9  
Cukup jelas  
Angka 10  
Cukup jelas  
Angka 11  
Cukup jelas  
Angka 12  
Cukup jelas  
Angka 13  
Cukup jelas  
Angka 14  
Cukup jelas  
Angka 15  
Cukup jelas  
Angka 16  
Cukup jelas  
Angka 17  
Cukup jelas  
Angka 18  
Cukup jelas  
Angka 19  
Cukup jelas  
Angka 20  
Cukup jelas  
Angka 21  
Cukup jelas  
Angka 22  
Cukup jelas  
Angka 23  
Cukup jelas  
Angka 24  
Cukup jelas  
Angka 25  
Cukup jelas  
Angka 26  
Cukup jelas  
Angka 27  
Cukup jelas  
Angka 28  
Cukup jelas  
Angka 29  
Cukup jelas

Angka 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah setiap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakikat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan” adalah upaya pencegahan atau penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang tidak terinfeksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah setiap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS tidak membedakan jenis kelamin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah setiap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap komponen masyarakat Kota Ambon tanpa kecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah setiap upaya di dalam Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara selaras, memiliki kesamaan visi dan strategi dan terkoordinasi antar lembaga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkesinambungan” adalah setiap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas rahasia” adalah upaya tidak membuka atau menginformasikan setiap hasil Tes HIV atau status HIV seseorang kepada orang lain yang tidak berhak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas sukarela” adalah setiap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS didasari oleh kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu.

Angka 31

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi lintas lembaga” adalah sinkronisasi dan/atau kerjasama sebagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga dan organisasi kemasyarakatan sehingga kegiatan serta kebijakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dengan “Standar Pelayanan Minimum” adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh sarana pelayanan kesehatan dan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah untuk pengawasan pelaksanaannya

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan hubungan seksual berisiko tidak terlindungi adalah hubungan seksual yang berganti ganti pasangan tanpa menggunakan kondom

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komunikasi, Informasi dan Edukasi” adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Komunikasi, Informasi dan Edokasi (KIE) dilaksanakan diseluruh lapisan masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan penggunaan kondom 100% adalah penggunaan kondom pada setiap melakukan hubungan seks berisiko.

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b



Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Umum” yaitu upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada semua pasien, setiap waktu untuk mengurangi resiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan tes HIV” adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki ruangan konseling sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, konselor yang sudah bersertifikat, dan seperangkat alat tes serologi HIV sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Resiko diperlukan dalam proses tes HIV karena konseling merupakan dialog rahasia antara seseorang dan pemberi layanan yang bertujuan orang tersebut mampu menyesuaikan diri dengan stress dan membuat keputusan yang sesuai berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS. Proses konseling termasuk evaluasi risiko personal transmisi HIV dan memfasilitasi perilaku pencegahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Anjuran tes HIV dilakukan apabila pasien yang dirawat petugas kesehatan memiliki tanda klinis AIDS.

Ayat (2)

Dalam hal pasien tidak dapat dimintai keterangan dan harus dites HIV, maka dapat meminta keterangan kepada keluarganya.

Dalam hal pasien tidak dapat dimintai persetujuan secara tertulis, maka dapat meminta persetujuannya kepada keluarganya.

Beberapa keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya konseling antara lain penurunan kesadaran, gangguan jiwa, dan/atau anak di bawah umur tanpa orang tua/wali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit lain” adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui berpindahnya cairan tubuh seperti darah, mani dan organ yang didonorkan. Penyakit tersebut antara lain Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, penyakit parasit darah seperti malaria.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kelompok dukungan sebaya” adalah dukungan untuk dan oleh orang dalam situasi yang sama.
- Pasal 19  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Anti Retroviral” adalah sejenis obat untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. Obat diberikan kepada ODHA yang memerlukan berdasarkan beberapa kriteria klinis, juga dalam rangka Prevention Of Mother To Child Transmission (PMTCT)  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
yang dimaksud dengan “surveilans perilaku” adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan sero survei adalah pengambilan dan pemeriksaan serum darah yang bertujuan untuk mengamati epidemi HIV pada populasi tertentu. Sero survei terdiri dari survei *sentinel* dan survei *ad hoc*.  
Survei *sentinel* adalah pengambilan dan pemeriksaan serum darah pada populasi tertentu yang dilakukan terus menerus pada orang dan tempat yang sama.  
Survei *ad hoc* adalah pengambilan dan pemeriksaan serum darah pada populasi berisiko tertentu yang dianggap memberikan kontribusi pada peningkatan epidemi HIV. Orang dan tempat survei *ad hoc* tidak harus sama tergantung pada spot populasi berisiko di suatu daerah.  
Yang dimaksud dengan “survei lainnya” antara lain: Survei Perilaku, Survei Cepat Perilaku, Survei Terpadu Biologis dan Perilaku, serta Survei IMS (Infeksi Menular Seksual).
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan metode *unlink anonymous* dalam sero survei adalah hasil pemeriksaan darah sampel tidak dapat dihubungkan dengan nama, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan identitas lain pemilik darah sampel. Hasil tes sampel darah hanya untuk mengetahui berapa hasil reaktif (hasil positif HIV) tanpa tahu siapa yang memiliki hasil reaktif tersebut.  
Yang dimaksud dengan metode *link confidential* adalah hasil pemeriksaan serologis dapat dihubungkan antara hasil pemeriksaan dengan pemilik darah sampel.  
Metode *link confidential* dapat digunakan apabila survei dilaksanakan menggunakan setting pelayanan yang menyediakan konselor dan terjaminnya proses konseling pra testing dan post testing. Keadaan tertentu digunakannya *link confidential* adalah adanya akses layanan

pada populasi survei, ditemukannya peningkatan trend epideniologi HIV pada populasi berisiko tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peningkatan trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna adalah meningkatnya status epidemi dari *low epidemic level* (< 5%) menjadi *concentrated epidemic level* (> 5%) atau dari *concentrated epidemic level* ke *generalized epidemic level* (> (11% pada populasi berisiko atau >1% di antara ibu hamil).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disfungsi sosial” adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koercif” adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bentuk bantuan langsung” antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyediaan Aksesibilitas” berupa panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “resiko tinggi” adalah suatu kondisi dimana kemungkinan terjadi penularan/terpapar HIV dan AIDS lebih tinggi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Medik” adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi optimal.

Angka 6

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Unlike Anonymous” adalah tidak diketahuinya identitas orang yang di tes dalam rangka sero surveilans sehingga tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk mengetahui prevalensi HIV pada populasi tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perilaku berisiko” adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV seperti melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahannya cairan tubuh yang mengandung HIV dengan pasangan yang belum diketahui status HIV-nya, dan menggunakan jarum suntik atau benda lain untuk menembus kulit yang tidak steril dan digunakan secara bersama-sama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal membuka status HIV ODHA diperlukan izin secara lisan atau tertulis dari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi sosial yang akan dihadapi dan kesiapan

psikomental ODHA itu sendiri, sehingga ODHA tersebut memperoleh manfaat dengan dibukanya status HIV-nya tersebut.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat beresiko” meliputi resosialisasi, salon plus, panti pijat plus, diskotik, tempat karaoke, klub malam, tempat penginapan dan hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan” adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Dunia Usaha” adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berperilaku hidup sehat” adalah tidak melakukan hubungan seksual beresiko, memakai jarum dan alat suntik steril atau disposable syringe, menjauhi narkoba dan minuman keras, berolahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketahanan keluarga” adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta kemampuan fisik, materiil, psikis, mental spritual untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin kebahagiaan batin termasuk terbebas dari tertular HIV dan AIDS.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR